

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Islam Unggulan

Muhammad Nur Hakim

Dosen Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto
munuhakim92@gmail.com

Abstract

School-based management is implemented so that it can give ease in achieving the vision, mission, and goals of the institution, so that it can improve the quality of education and bring a good end result and quality, and can get a productive and qualified graduates. This research was conducted in SMP Ar-Rohmah and SMP Plus Al-Kauthar Malang, where the school is the educational institution that has a future orientation. The institutions including educational institutions featured with learners who are full of achievement in terms of both academic and non-academic. This study focused on four issues, are: 1) The factors that encourage the implementation of MBS; 2) The principles of what is done in the implementation of MBS; 3) What is the purpose of implementation of MBS; and 4) How does the structural components MBS implementation. This study used qualitative methods, multi-sites. data collection used the interview, observation and documentation. The research findings were: 1) the factors that encourage the implementation of MBS is: (a) the existence of decentralization; (b) a factor of independence against a school owned resources; (c) factors initiative; and (d) a factor of innovation against the increase in the quality of education. Then the purpose of the implementation of the MBS, namely: (a) so that the school could improve the quality of education by making the school more independent, have awareness/participation, teamwork, initiative and school in managing, utilizing, and empower the resources available; (b) the school can be more generous in taking decisions together and initiate and innovate in the process of improving the quality of education. 2) Then there are structural components of the MBS implementation, namely: (a) the management of curriculum and instructional programs; (b) the management of produce educators in schools; (c) the student Management; (d) financial management and financing; (e) management of educational facilities and infrastructure; (f) management the management of the school and community relations; (g) the management of special service institution that is effective and efficient.

Keywords: *School-Based Management, Islamic Educational Excellent*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan terminologi baru yang dikenal dalam kelompok negara-negara Asia Tenggara. MEA merupakan upaya baru kelompok negara ASEAN dalam meningkatkan perekonomian dunia. Perbedaan mendasar dengan Uni Eropa, MEA bukan merupakan integrasi ekonomi yang harus memiliki satu mata uang bersama, penyeragaman kebijakan ekonomi dan kesamaan pandangan dalam kebijakan fiskal. MEA lebih mengarah pada kebersamaan dalam menggerakkan ekonomi secara bersama-sama sehingga mengundang investor

raksasa menanamkan investasinya lebih besar di kawasan ini. Walaupun model MEA menjunjung tinggi kebersamaan ekonomi, tapi bukan berarti tanpa persaingan antara sesama negara MEA. Persaingan semakin kuat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perdagangan dan jasa serta industri manufaktur. Substansi persaingan akan mengarah pada satu sektor yakni pengembangan pendidikan. Pertanyaan besarnya bagaimana mengembangkan model pendidikan yang mampu melakukan akselerasi dan antisipasi akurat dalam menyongsong kompetisi MEA ini. Model pendidikan yang bukan hanya menghasilkan out put dengan

kompetensi nasional namun memiliki kompetensi profesional dalam area regional.¹

Maka untuk menciptakan SDM yang terampil, mumpuni dan profesional, tidak terlepas dari pendidikan yang unggul dan berkualitas. Tanpa pendidikan yang unggul dan berkualitas, harapan untuk menciptakan SDM yang terampil, mumpuni dan profesional, akan hanya menjadi sebuah harapan saja.

Ada beberapa faktor yang menjadi problem manajemen pendidikan. *Pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *input output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. *Kedua*, pendekatan penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada birokrasi. Dan *ketiga*, peran serta masyarakat, khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Dukungan dari orang tua selama ini hanya berupa bantuan dana, sehingga orang tua tidak merasa memiliki sekolah, sebaliknya sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pendidikannya kepada masyarakat.²

Oleh karena itu salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan diadakannya otonomi pendidikan, otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.³ Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien dalam menangani berbagai permasalahan pendidikan, pemerintah daerah tidak mungkin dapat bekerja secara sendirian, karena masih ada pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap bidang pendidikan tersebut, seperti orang tua (masyarakat), sekolah (lembaga pendidikan), dan institusi sosial lain. Karena itu kerja sama pihak yang berkepentingan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka

pelaksanaan asas desentralisasi, terutama dalam bidang pengelolaan pendidikan. Strategi pengelolaan pendidikan yang mengedepankan kerjasama antara berbagai pihak seperti di atas saat ini lebih dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).⁴

Dalam kerangka inilah MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antar sekolah, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.⁵ Menurut Tim Pokja MBS Jawa barat bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan sumber daya; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat; meningkatkan tanggung jawab sekolah pada orang tua, sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah; meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.⁶

Seiring dengan adanya desentralisasi yang ditandai dengan MBS, otonomi dalam pengelolaan pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan global terutama MEA pada abad modern dan teknologi ini, SMP Ar-Rohmah Malang dan SMP Plus Al-Kautsar Malang mempunyai peran yang sangat penting. Kedua lembaga ini merupakan sekolah yang termasuk unggul dan maju dalam pembelajarannya dan diharapkan mampu menghadapi tantangan yang semakin berat sejalan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat.

Untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan yang mampu melakukan proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan profesional serta dapat

¹ Yadi Mulyadi, "Pengembangan Model Pendidikan Teknologi Kejuruan Berbasis Isu Global Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal APTEKINDO*, (November, 2014), hlm. 1240

² Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Depdiknas, 2000), hlm 2

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap*

Penyelenggaraan pendidikan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 82

⁴ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 195

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 11

⁶ Mulyono, *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm 244

menghasilkan output yang berkualitas, maka perlu diadakan tindakan yang terencana dengan baik, terutama manajemennya. Ada beberapa indikator yang menyatakan sekolah ini menerapkan MBS, diantaranya memiliki wewenang sendiri dalam mengatur seluruh kepentingan sekolah, memiliki fleksibilitas dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki, dan ada partisipasi langsung selain dari warga sekolah tapi juga dari masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Oleh karena program-program SMP Ar-Rohmah Malang dan SMP Plus Al-Kautsar Malang menekankan pada Manajemen Berbasis Sekolah dalam meningkatkan mutu, maka sekolah ini diharapkan dapat menjadi sekolah Islam unggulan.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka jelas bahwa manajemen lembaga pendidikan terutama berperan dalam mewujudkan sekolah Islam unggulan. Mengingat pentingnya sekolah Islam yang unggul untuk generasi muda kita saat ini. Maka peneliti merasa perlu untuk meneliti Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Islam Unggulan. (Studi Multisitus di SMP Ar-Rohmah Malang dan SMP Plus Al-Kautsar Malang).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Manajemen Berbasis Sekolah diimplementasikan untuk mewujudkan sekolah Islam unggulan di SMP Ar-Rohmah dan SMP Plus Al-Kautsar Malang?
2. Bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk mewujudkan sekolah Islam unggulan di SMP Ar-Rohmah dan SMP Plus Al-Kautsar Malang?

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong implementasi manajemen berbasis sekolah diantaranya, yang *pertama* adalah karena sekolah ingin mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah yang mereka buat sendiri, sehingga perlu adanya inisiatif dan inovasi sendiri dari pihak sekolah dan akhirnya

sekolah tidak hanya bersifat statis yakni mengikuti pemerintah saja, namun dapat dinamis sesuai dengan yang mereka inginkan. Oleh karena itu mereka mengharapkan dengan adanya desentralisasi pendidikan mereka dapat memiliki wewenang penuh dan ruang yang lebih luas terhadap kekuasaan akan lembaganya untuk mengambil keputusan, berkembang dan lebih maju, sehingga sekolah menjadi lebih mandiri, efektif, dan efisien dalam semua kegiatannya.

Sama halnya dengan pendapat mulyasa, bahwa otonomi pendidikan diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar serta mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Dan kewenangan yang bertumpu pada sekolah, hal itu merupakan inti dari penerapan MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi.⁷

Nurkolis juga berpendapat, dalam manajemen sekolah model MBS ini berarti tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, warga sekolah memiliki otonomi dan tanggung jawab yang besar atas penggunaan sumber daya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah. MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, pendidik, dan administrator yang profesional. Dengan demikian, sekolah juga akan lebih bersifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing peserta didik dan masyarakat sekolah.⁸

Kemudian yang *kedua* faktor kemandirian, pihak sekolah menginginkan agar sekolahnya dapat menjadi sekolah unggul dengan cara membuat program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sekolah bisa mencari edukasi maupun pengalaman di luar sekolah, seperti kunjungan ke pabrik-pabrik, perusahaan maupun lembaga lain untuk menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan mereka. Serta yang *ketiga* yaitu faktor inisiatif dan inovasi diri sendiri untuk bisa mencapai visi, misi dan tujuannya tanpa harus bergantung pada pemerintah.

⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional...* hlm. 33

⁸ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori...* hlm. 3-5

Menurut Tim Pokja Jawa Barat, MBS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan sumber daya; meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat; meningkatkan tanggung jawab sekolah pada orang tua, sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah; meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong untuk mengimplementasikan MBS adalah adanya faktor desentralisasi; faktor kemandirian terhadap sumber daya sekolah; dan faktor inisiatif dan inovasi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah, *pertama* agar sekolah dapat meningkatkan kemandirian dengan memiliki kewenangan penuh baik dalam pengambilan keputusan atas semua hal. Kemudian *kedua* karena perlu adanya pemberdayaan sumber daya sekolah dengan efektif dan efisien, agar perkembangan sekolah yang terus berkembang itu dapat terpenuhi dengan cepat. Tujuan yang *ketiga* agar sekolah juga dapat meningkatkan partisipasi pihak lain seperti Komite, wali murid, maupun masyarakat sekitar pada umumnya untuk ikut andil. Sehingga pihak sekolah dapat meningkatkan kinerja semua warga sekolahnya dan terlebih lagi pihak sekolah lebih bisa berinisiatif dan berinovasi dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Secara umum Hardiyanto juga mengatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah agar lebih mandiri atau memberdayakan sekolah melalui pemberian wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.¹⁰

Hasbullah juga mengatakan tujuan dari penerapan manajemen berbasis sekolah ialah meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerja sama,

akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.¹¹

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah dalam mengimplementasikan MBS bertujuan yang *pertama*, agar sekolah bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan membuat sekolah lebih mandiri, memiliki kepedulian/partisipasi, kerja sama, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. *Kedua*, sekolah juga dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan secara bersama dan berinisiatif dan berinovasi dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Kemudian mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah menunjukkan bahwa prinsip yang dipakai di antaranya ialah, yang *pertama* prinsip kemandirian, sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan sendiri sehingga perlu agar sekolah dapat bersikap mandiri terutama dalam pengelolaan program-program yang dibutuhkan peserta didik dan pendanaan operasional sekolah. *Kedua* prinsip desentralisasi, dengan sekolah memiliki otonomi penuh, pihak sekolah juga dapat memiliki ruang yang lebih luas untuk bergerak, berkembang dan bekerja menurut strategi-strategi unik mereka secara efektif. Dan dimaksudkan agar sekolah bisa mengambil keputusan sendiri dan dapat menyelesaikan permasalahannya baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dan *ketiga* ada pula prinsip fleksibilitas, di mana sekolah dapat membuat keputusan atas dirinya sendiri baik dalam permasalahan internal maupun eksternal sesuai dengan kondisi sekolahnya.

Menurut Nurkolis Manajemen Berbasis Sekolah menyadari pentingnya untuk memberikan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Sekolah memiliki otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi mereka masing-masing. Jadi ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harus diselesaikan dengan cara sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah

⁹ Mulyono, *Manajemen Administrasi...* hlm 244

¹⁰ Hardiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi...* hlm.

¹¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah..."* hlm. 72

terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ketingkat sekolah. Dengan adanya kewenangan di tingkat sekolah itulah maka sekolah dapat melakukan sistem pengelolaan sendiri.¹²

Prinsip *keempat* lainnya yaitu prinsip inisiatif sumber daya manusia, karena sumber daya manusia di sekolah sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar serta memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan sehingga kinerjanya akan dapat membantu sekolah untuk mendapatkan inisiatif dan inovasi untuk mengembangkan mutu pendidikan di sekolahnya. Dan *kelima* yaitu prinsip inovasi, diharapkan semua pihak sekolah dapat melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas dalam mengelola seluruh lingkungan sekolah dan bisa memotivasi para warganya untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan.

Prinsip ini menekankan bahwa orang adalah sumber daya manusia yang berharga di dalam organisasi, sehingga poin utama manajemen adalah mengembangkan sumber daya manusia di dalam sekolah untuk berinisiatif. Disamping itu pula prinsip ini mengakui bahwa sekolah tidak lagi menggunakan manusia sebagai sumber daya yang statis, melainkan dinamis yakni menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan.¹³

Kemudian yang *keenam* juga ada prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dimaksudkan agar pertanggung jawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat dan pemerintah itu dilakukan secara terbuka melalui pelaporan dan pertemuan.

Pada prinsipnya MBS merupakan reformasi dari sentralisasi pendidikan menjadi desentralisasi pendidikan, yang memiliki prinsip-prinsip seperti kemandirian, akuntabilitas, transparan, kemitraan, partisipasi, efektif dan efisien.¹⁴

Dengan dipilihnya MBS untuk pendidikan dasar dan menengah karena diyakini model ini akan mempermudah pencapaian pendidikan yang baru. Sebab dalam pelaksanaannya MBS memiliki ciri-ciri

adanya otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peran serta aktif masyarakat dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pendidikan.¹⁵

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip yang dikerjakan dalam implementasi MBS diantaranya ialah prinsip kemandirian; prinsip desentralisasi; prinsip fleksibilitas; prinsip inisiatif Sumber Daya Manusia; prinsip akuntabilitas dan transparansi; dan prinsip inovasi.

Ada beberapa komponen-komponen yang di anggap penting dalam Implementasi MBS ini, yang pertama ialah manajemen kurikulum dan program pengajaran. Seharusnya perencanaan maupun pengembangan kurikulum ini telah dilakukan oleh departemen pendidikan nasional, namun karena pemerintah yang membuatnya maka akan sama antar kurikulum diseluruh daerah Indonesia, padahal semua daerah belum tentu sama dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik. Sehingga pihak sekolah harus memiliki inisiatif yang baik agar mereka dapat mengembangkan kurikulum yang dibutuhkan peserta didik dan menjadi sekolah dengan mutu yang baik.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan ada beberapa komponen yang dianggap penting dalam Implementasi MBS ini, yang pertama ialah manajemen kurikulum dan program pengajaran. Dalam pengembangan kurikulum maupun program pengajarannya sudah membuktikan bahwa pengembangan kurikulum dan program pengajaran ini sangat dibutuhkan terutama bagi peserta didik, karena setiap sekolah bahkan daerah itu memiliki kebutuhan pendidikan yang berbeda pula sesuai dengan visi misi maupun tujuan sekolahnya. Mereka tetap mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, tetap menggunakan kebijakan dan kurikulum pemerintah, hanya saja mereka mengembangkannya dengan menyesuaikan kebutuhan mereka masing-masing.

Manajemen kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari MBS yang di dalamnya mencakup kegiatan perencanaan,

¹² Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori...* hlm. 53

¹³ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori...* hlm. 52-55

¹⁴ Nurul Widayanti, "Optimalisasi Unit Produksi Akuntansi..." hlm. 124

¹⁵ Mulyono, *Manajemen Administrasi...* hlm. 234

pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Sesungguhnya perencanaan dan pengembangan kurikulum ini pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Namun hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh sekolah adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu pula sekolah juga bertugas untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.¹⁶

Selanjutnya hasil penelitian mengenai komponen manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini menunjukkan bahwa proses manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah yang menerapkan MBS sama-sama memberikan beban kepada para karyawannya yang berupa tanggung jawab yang tujuannya agar sumber daya manusia yang mereka miliki ini dapat terasah potensi dan kompetensinya menjadi lebih terupgrade. Sehingga menjadikan kinerja mereka lama-kelamaan akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan semua itu terbukti dapat meningkatkan kompetensi maupun kinerja yang dimiliki oleh para pendidik maupun kependidikannya.

Sama halnya dengan Mulyasa yang mengatakan bahwa, manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendaya gunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien agar supaya menghasilkan hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.¹⁷

Komponen yang selanjutnya, yaitu manajemen kesiswaan. Hasil penelitian juga menunjukkan dalam lingkup manajemen kesiswaan seperti penerimaan murid baru itu selalu ada seleksi, karena mereka hanya memiliki kuota yang tidak banyak. Untuk seleksi yang dilakukan ada beberapa yang diteskan, yaitu ada tes potensi akademik, tes Al-Qur'an, dan wawancara dengan peserta didik dan orangtuanya. Namun ada juga sekolah yang tidak perlu ada seleksi masuk, karena sekolah menganggap semua anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa harus memilah dan memilih anak yang berprestasi saja. Adanya manajemen

kesiswaan juga bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan.

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah.¹⁸

Dari hasil penelitian menunjukkan komponen yang selanjutnya yaitu komponen manajemen keuangan dan pembiayaan. Di dalam sekolah yang telah diteliti, manajemen pembiayaan ini bersifat mandiri dalam artian mereka yang mencari sumber dana operasional sekolahnya dan hanya menerima bantuan pemerintah yang berupa Bantuan Operasional Sekolah itu saja. Namun terkadang pihak sekolah juga mendapatkan bantuan dari pihak yayasan, tetapi ini merupakan bentuk kerjasama yang dijalin oleh pihak sekolah terhadap pihak yayasan sendiri. Serta manajemen mereka juga sangat akuntabel dan transparan yang dimaksudkan dalam pertanggung jawaban sekolah kepada warga sekolah, masyarakat dan pemerintah itu dilakukan secara terbuka melalui pelaporan dan pertemuan.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dan dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.¹⁹

¹⁶ M. Ahmad, Dkk, *Pengembangan Kurikulum...* hlm. 145

¹⁷ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah...* hlm. 41

¹⁸ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah...* hlm. 42

¹⁹ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah...* hlm. 44

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen yang selanjutnya yaitu komponen manajemen sarana dan prasarana sekolah. Untuk pemenuhan kebutuhan di sekolah, maka pihak sekolah dalam memenuhi kebutuhan itu bekerjasama dengan yayasan mereka sendiri, baik itu sarana prasarana fisik maupun non fisik. Untuk perawatan dan pertanggung jawabannya, sekolah sudah sama-sama memiliki karyawan yang tugasnya untuk selalu mengecek dan memperbaiki sarana prasarana serta melaporkan kepada atasan terkait semua itu.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan dan penataan.²⁰

Namun lebih lanjut Hasbullah menyebutkan bahwa pada garis besarnya manajemen sarana dan prasarana meliputi lima hal diantaranya adalah: (1) penentuan kebutuhan, (2) proses pengadaan, (3) pemakaian, (4) pencatatan dan (5) pertanggungjawaban.²¹

Dari hasil penelitian menunjukkan komponen selanjutnya adalah komponen manajemen HuMas. Karena komponen ini kinerjanya untuk membantu sekolah dari dalam dan dari luar. Hasil yang telah dicapai oleh sekolah yang diteliti diantaranya yaitu menjadikan wali murid, maupun komite sekolah dapat berperan serta dalam menunjang peningkatan mutu pendidikannya, serta juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk dijadikan sumber edukasi selain di sekolah dan kelas. Ini dapat dilihat dari bagaimana wali murid dan komite dalam partisipasinya baik itu berupa jasa, ide-ide, masukan maupun kontribusi yang lain ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya diluar kelas, dan juga terkadang kunjungan pada lembaga lain, perusahaan, pabrik dan lain sebagainya untuk tambahan bahan edukasi peserta didik yang tak didapatkan di sekolah.

Namun pada dasarnya humas tidak hanya bersifat publisitas belaka, tapi lebih bersifat

bagaimana sekolah membangun jalinan kerja sama dengan pihak-pihak lain berupa *networking*, di mana kerja sama ini untuk kondisi sekarang merupakan sesuatu yang sangat vital dan penting dilakukan, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah.²²

Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan harmonis dan penuh rasa tanggung jawab maka masyarakat akan semakin memahami dan menyadari pentingnya memajukan sekolah demi pendidikan anak didik dan perkembangan anak didik. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, maka sekolah dituntut untuk lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis. Sehingga melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapainya tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan sekolah produktif yang berkualitas.²³

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen selanjutnya ialah manajemen layanan khusus. Komponen ini terkait dengan layanan perpustakaan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Di sekolah yang diteliti sudah menyiapkan perpustakaan yang berupa buku-buku, majalah, jurnal dan lain-lain, serta yang berbentuk digital. Untuk layanan kesehatan di kedua sekolah ini sama-sama memiliki unit kesehatan sekolah namun berbeda penanganannya, seperti diberikan layanan langsung dari perawat dan dokter yang berasal langsung dari puskesmas, sedangkan ada juga yang diberikan layanan perawat dan adanya klaim asuransi 24 jam untuk para peserta didik. Kemudian layanan keamanan, dari keduanya sama-sama memiliki keamanan yang menjaga dalam 24 jam sehari. Di mana para penjaga atau satpam ini ada tiga orang yang memiliki shift yang berbeda, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Dengan adanya layanan keamanan ini, sekolah dapat merasa lebih aman dan nyaman lagi dalam melayani peserta didik dan dapat membantu mereka lebih baik

²⁰ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah...* hlm. 46

²¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah..."* hlm. 120

²² Hasbullah, *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah..."* hlm. 124-126

²³ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah...* hlm. 50-52

lagi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas.

Adapun yang dimaksud dengan manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-waktu kosong di sekolah maupun di rumah. Di samping itu, juga memungkinkan pendidik untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi.²⁴

Dari hasil pembahasan antara teori dan data yang diperoleh dapat disimpulkan komponen-komponen dalam implementasi MBS adalah: 1) Manajemen kurikulum dan program pengajaran. Tetap menerapkan kurikulum pemerintah namun ada pengembangan yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri. 2) Manajemen tenaga kependidikan. Sekolah dalam mendaya-gunakan sumber daya manusianya lebih mengacu kepada kinerja yang efektif dan efisien, dan juga memberikan upaya kepada SDM-nya untuk meningkatkan potensi agar kinerja mereka lebih baik. 3) Manajemen kesiswaan. Memiliki perbedaan pada penerimaan peserta didik baru, namun dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah memiliki upaya yang sangat baik. 4) Manajemen keuangan dan pembiayaan. Sekolah memiliki sumber pendanaan dari yayasan, wali murid, dan pemerintah yang dikelola secara mandiri dan transparan. 5) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pemenuhan kebutuhan dan proses pengadaan sarana prasarana, sekolah berusaha secara mandiri tanpa ada bantuan dan campur tangan pemerintah. Namun dalam proses pemenuhan kebutuhan sekolah lebih cepat dalam pemenuhannya, karena tidak perlu ada penundaan. 6) Manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam manajemen humas, sekolah berupaya agar masyarakat terutama wali murid dan komite ikut peduli dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sehingga anak-anak mereka dapat lulus sebagai lulusan

yang produktif dan berkualitas. 7) Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Layanan khusus dari sekolah untuk para peserta didik sangat efektif dan efisien, karena semua layanan khusus seperti perpustakaan, kesehatan, keamanan dan BK dapat diperoleh oleh mereka dengan baik, sehingga dapat membantu kegiatan proses belajar mengajar dengan baik.

D. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mendorong untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah untuk mewujudkan sekolah Islam unggulan adalah: 1) adanya faktor desentralisasi; 2) faktor kemandirian terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah; 3) faktor inisiatif; dan 4) faktor inovasi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dan tujuan sekolah mengimplementasikan MBS untuk mewujudkan sekolah Islam unggulan yaitu: 1) Agar sekolah bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan membuat sekolah lebih mandiri, memiliki kepedulian/partisipasi, kerja sama, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2) sekolah dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan secara bersama dan berinisiatif dan berinovasi dalam proses peningkatan mutu pendidikan.

Prinsip-prinsip yang dikerjakan dalam implementasi MBS untuk mewujudkan sekolah Islam unggulan yaitu: 1) prinsip kemandirian; 2) prinsip desentralisasi; 3) prinsip fleksibilitas; 4) prinsip inisiatif Sumber Daya Manusia; 5) prinsip akuntabilitas dan transparansi; dan 6) prinsip inovasi. Serta komponen-komponen struktural implementasi Manajemen Berbasis Sekolah ialah, 1) Manajemen kurikulum dan program pengajaran. Di mana sekolah tetap menerapkan kurikulum pemerintah namun ada pengembangan yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri. 2) Manajemen tenaga kependidikan. Sekolah dalam mendayagunakan sumber daya manusianya lebih mengacu kepada kinerja yang efektif dan efisien, dan juga memberikan upaya kepada SDM-nya untuk meningkatkan potensi agar kinerja mereka lebih baik. 3) Manajemen kesiswaan. Memiliki perbedaan

²⁴ E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah...* hlm. 52-53

pada penerimaan peserta didik baru, namun dalam upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah memiliki upaya yang sangat baik. 4) Manajemen keuangan dan pembiayaan. Sekolah memiliki sumber pendanaan dari yayasan, wali murid, dan pemerintah yang dikelola secara mandiri dan transparan. 5) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam pemenuhan kebutuhan dan proses pengadaan sarana prasarana, sekolah berusaha secara mandiri tanpa ada bantuan dan campur tangan pemerintah. Namun dalam proses pemenuhan kebutuhan sekolah lebih cepat dalam pemenuhannya, karena tidak perlu ada penundaan. 6) Manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam manajemen humas, sekolah berupaya agar masyarakat terutama wali murid dan komite ikut peduli dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sehingga anak-anak mereka dapat lulus sebagai lulusan yang produktif dan berkualitas. 7) Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Layanan khusus dari sekolah untuk para peserta didik sangat efektif dan efisien, karena semua layanan khusus seperti perpustakaan, kesehatan, keamanan dan BK dapat diperoleh oleh mereka dengan baik, sehingga dapat membantu kegiatan proses belajar mengajar dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam, Transformasi Menuju Sekolah/ Madrasah Unggul* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Kuncoro, Gatot. “*Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi MBS di MTS Negeri Piyungan Yogyakarta*”, Tesis MA, (Yogyakarta: UIN, 2008)
- Darodjat, “*Pola Implementasi MBS di MAN 3 Malang Jawa Timur*”, Tesis MA, (Yogyakarta: UIN, 2004)
- Dally, Dadang. *Balanced Score Card, Suatu Pendekatan Dalam Implementasi MBS*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), cet. ke-3.
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Depdiknas, 2000)
- Departemen Agama RI, *Desain Pengembangan Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004)
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) Cet. Ke-2.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi* (Yogyakarta: Arruz Media, 2012).
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan “Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan pendidikan”*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006).
- Hardiyanti, *Mencari Sosok Desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Husaini, Usman, *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*, (Bumi Aksara: Jakarta, 2006)
- Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000)
- LPI Ar-Rohmah Malang, *Pedoman Pendidikan Tahun Pelajaran 2015-2016*, Ar-Rohmah Malang
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohedi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2007)
- Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Vol 3 (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996)
- Mulyadi, Yadi. *Pengembangan Model Pendidikan Teknologi Kejuruan Berbasis Isu Global Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*. (Bandung: Jurnal Aptekindo, 2014)
- Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional “Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK”*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Mulyono, *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)
- Nanang Fatah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan* (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013)
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori Model dan Aplikasi*, (Jakarta, Grasindo, 2003).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Supriono S dan Achmad Sapari, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Ikapi Jatim: SIC, 2001)
- Suprayogo, Imam. *Reformasi Visi Pendidikan Islam* (Malang: STAIN Press. 1999)
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

- Widayanti, Nurul. *Optimalisasi Unit Produksi Akuntansi Untuk Pembentukan Karakter Lulusan Yang Siap Menghadapi MEA*, (Jurnal Prosiding, Nasional Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan)
- Zainudin, *Reformasi Pendidikan, Kritik Kuriulum Dan MBS*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)